

## **ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KETIMPANGAN PENDAPATAN ANTAR PROPINSI DI INDONESIA PERIODE 1993-2005**

**Oleh:**  
**Yadiansyah**

### **ABSTRACT**

*This research is aimed to analyze the economic growth of provinces in Indonesia from 1993 to 2005 and also inequality of income among provinces in Indonesia whether within group provinces or between group provinces inequality and the factors that influenced them by using Indeks Theil analysis method.*

*The finding show that the inequality between provinces group in 1993 to 2005 has shown the decreasing trend with oil and gas or without them, eventhough it generally flutuates. The average of inequality among provinces group has reached 0,4694086 with oil and gas where without oil and gas reached 0,540413.*

*The highest inequality of income within provinces group in period 1993-2005 occured in Sulawesi provinces group with inequality average 0,2823691 with oil and gas and 0,282182 without oil and gas. The lowest inequality of income occured in IBT provinces group with inequality average 0,2092553 with oil and gas, without oil and gas 0,07172 occured in Kalimantan group.*

*Keywords : Economical Growth, Inequality of Income.*

### **PENDAHULUAN**

Munculnya isu pembangunan daerah di Indonesia pada dasarnya berkaitan dengan terjadinya kesenjangan dalam proses pelaksanaan pembangunan dan kesenjangan dalam pembagian hasil-hasil pembangunan (Teguh, 2004:116). Persoalan disparitas pembangunan nasional sebenarnya telah menjadi bahan pembicaraan umum yang berkembang di masyarakat, ada indikasi terutama di wilayah Indonesia bagian Timur proses pembangunanya tidak lancar. Sejumlah daerah Indonesia telah berkembang

kantong-kantong kemiskinan yang kesemuanya itu adalah sangat bertentangan dengan tujuan pembangunan ekonomi itu sendiri (Teguh, 2004:117).

Otomomi daerah sebagai salah satu tonggak desentralisasi bukanlah suatu tema lama dalam perbincangan politik nasional. Kegagalan kebijakan yang bersifat sentralistik dalam menciptakan pembangunan yang merata di Indonesia telah menjadi awal terciptanya suatu strategi baru yang kemudian dikenal sebagai desentralisasi. Tidak sedikit daerah di negeri ini khususnya yang berada di luar Jawa merasakan adanya ketidakadilan dalam distribusi pembangunan di wilayahnya sementara potensi sumber daya alamnya yang melimpah terus dieksploitasi sebagai sumber penerimaan bagi pusat (Dalam Tadjoeuddin, Suharyo, dan Mishra, 2001:6). Kekecewaan yang terus mengkristal dan sempat menjurus kepada disintegrasi bangsa akhirnya mendorong perubahan kebijakan sentralistik tersebut menjadi desentralisasi yang diwujudkan dengan penerapan otonomi daerah.

Tambunan (Dalam Teguh, 2004:122) menyatakan, ada beberapa faktor yang memungkinkan terjadinya ketimpangan tersebut yaitu mulai dari faktor konsentrasi kegiatan ekonomi, alokasi investasi, tingkat mobilitas faktor, perbedaan sumber daya alam antar wilayah, perbedaan kondisi geografis, sampai kepada perbedaan tingkat kelancaran perdagangan antar daerah.

**Tabel 1. PDRB Dengan Migas Grup-Propinsi di Indonesia  
Atas Dasar Harga Konstan 1993 Periode 1993-2005 (Milyar Rupiah)**

| Tahun | Sumatera  | Jawa-Bali | Kalimantan | Sulawesi | IBT      |
|-------|-----------|-----------|------------|----------|----------|
| 1993  | 70.428,3  | 195.202,0 | 28.490,8   | 11.553,5 | 12.098,0 |
| 1994  | 76.857,7  | 212.984,6 | 31.254,8   | 12.700,6 | 13.023,1 |
| 1995  | 82.186,5  | 227.718,6 | 33.364,8   | 13.405,4 | 14.628,0 |
| 1996  | 82.186,5  | 247.432,7 | 36.459,0   | 14.511,8 | 16.103,9 |
| 1997  | 91.369,9  | 258.384,9 | 38.418,6   | 15.510,0 | 17.032,8 |
| 1998  | 84.513,7  | 219.832,1 | 33.678,0   | 16.006,4 | 17.381,5 |
| 1999  | 85.954,0  | 233.058,9 | 38.775,6   | 17.419,7 | 16.640,9 |
| 2000  | 90.690,6  | 258.772,5 | 40.175,3   | 19.215,7 | 17.823,6 |
| 2001  | 93.920,3  | 268.899,9 | 41.792,5   | 20.171,1 | 18.225,1 |
| 2002  | 97.582,1  | 279.372,1 | 43.443,5   | 21.168,2 | 19.360,9 |
| 2003  | 102.013,4 | 291.714,9 | 44.802,0   | 22.288,9 | 20.045,2 |
| 2004  | 105.276,9 | 307.721,4 | 46.140,0   | 23.561,2 | 20.329,8 |
| 2005  | 108.757,2 | 325.286,9 | 47.912,8   | 25.011,9 | 21.650,5 |

Sumber: Statistik Indonesia periode 1993-2005, BPS SumSel

Sejak tahun 1993 sampai dengan tahun 2005, grup-propinsi Jawa-Bali memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB Indonesia baik dengan migas maupun

tanpa migas. Grup-propinsi Jawa-Bali memberikan kontribusi sebesar 62,85 persen terhadap PDB Indonesia, diikuti oleh Sumatera dengan kontribusi sebesar 20,1 persen, lalu Kalimantan dengan kontribusi 8,43 persen, kemudian Sulawesi dengan kontribusi 4,44 persen dan terakhir Indonesia Bagian Timur (IBT) dengan kontribusi sebesar 4,15 persen dalam periode 1993-2005.

**Tabel 2. PDRB Tanpa Migas Grup-Propinsi di Indonesia  
Atas Dasar Harga Konstan 1993 Periode 1993-2005 (Milyar Rupiah)**

| Tahun | Sumatera | Jawa-Bali | Kalimantan | Sulawesi | IBT      |
|-------|----------|-----------|------------|----------|----------|
| 1993  | 52.243,6 | 189.964,7 | 20.684,6   | 11.553,4 | 11.859,8 |
| 1994  | 57.447,2 | 208.074,5 | 22.393,2   | 12.700,6 | 12.703,7 |
| 1995  | 62.778,3 | 222.971,0 | 24.763,2   | 13.405,4 | 14.361,5 |
| 1996  | 68.151,5 | 241.971,0 | 27.391,8   | 14.301,8 | 15.850,7 |
| 1997  | 72.353,6 | 248.067,1 | 29.113,4   | 15.513,0 | 16.775,0 |
| 1998  | 66.598,4 | 214.603,8 | 27.754,4   | 15.963,5 | 17.100,7 |
| 1999  | 68.022,0 | 226.034,4 | 28.735,7   | 17.389,1 | 16.429,5 |
| 2000  | 73.025,5 | 251.640,9 | 29.667,9   | 19.180,7 | 17.618,1 |
| 2001  | 75.727,2 | 261.997,9 | 31.050,0   | 20.134,0 | 18.030,0 |
| 2002  | 79.037,9 | 272.207,5 | 32.555,9   | 21.129,4 | 19.164,5 |
| 2003  | 82.932,4 | 284.512,1 | 33.897,5   | 22.349,8 | 19.810,9 |
| 2004  | 87.852,1 | 300.752,7 | 35.870,3   | 23.625,5 | 20.071,8 |
| 2005  | 93.559,2 | 324.436,6 | 38.078,9   | 25.268,0 | 21.353,0 |

Sumber: Statistik Indonesia periode 1993-2005, BPS SumSel

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut : Bagaimana perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) grup-propinsi di Indonesia periode 1993-2005 dan Beberapa besar perbedaan tingkat pendapatan antar grup-propinsi dan di dalam grup-propinsi yang dikelompokkan berdasarkan 5 kelompok pulau besar di Indonesia periode 1993-2005.

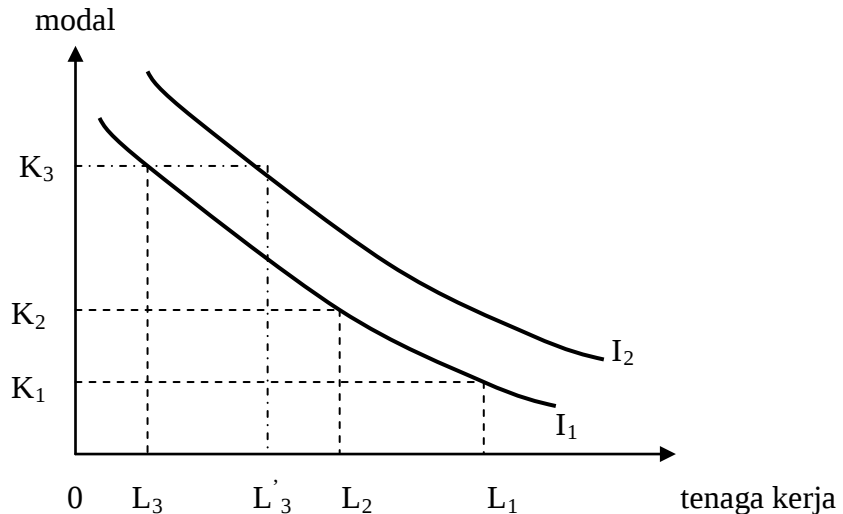
## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Teori Pertumbuhan Ekonomi**

Teori Pertumbuhan Neo-Klasik (Solow-Swan), Teori ini dikembangkan oleh Robert Solow dan Travor Swan menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung pada tambahan persediaan faktor-faktor produksi (penduduk, tenaga kerja, dan akumulasi modal) dan tingkat kemajuan teknologi (Sukirno, 1982:293). Pandangan ini didasarkan pada anggapan yang mendasari analisis klasik, yaitu perekonomian akan tetap mengalami tingkat penggunaan tenaga kerja penuh (*full employment*) dan kapasitas peralatan modal akan tetap sepenuhnya digunakan sepanjang waktu. Dengan kata lain, perekonomian akan

berkembang tergantung pada pertumbuhan penduduk, akumulasi modal, dan kemajuan teknologi.

Teori pertumbuhan Neo-Klasik dapat digambarkan sebagai berikut :



**Gambar 1. Teori Pertumbuhan Neo-Klasik**

Fungsi produksi yang ditunjukkan oleh  $I_1$  dan  $I_2$  yang berbentuk sedemikian rupa, suatu tingkat output tertentu dapat diciptakan dengan menggunakan berbagai kombinasi modal dan tenaga kerja. Misalnya untuk menciptakan output sebesar  $I_1$ , kombinasi modal dan tenaga kerja yang dapat digunakan antara lain  $K_3$  dan  $L_3$ ,  $K_2$  dan  $L_2$ , serta  $K_1$  dan  $L_1$ .

Simon Kuznets (Dalam Todaro, 2000:144) memberikan definisi tentang pertumbuhan ekonomi suatu negara sebagai kenaikan kapasitas dalam jangka panjang untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas tersebut dimungkinkan oleh adanya kemajuan teknologi, kelembagaan, dan perubahan ideologi.

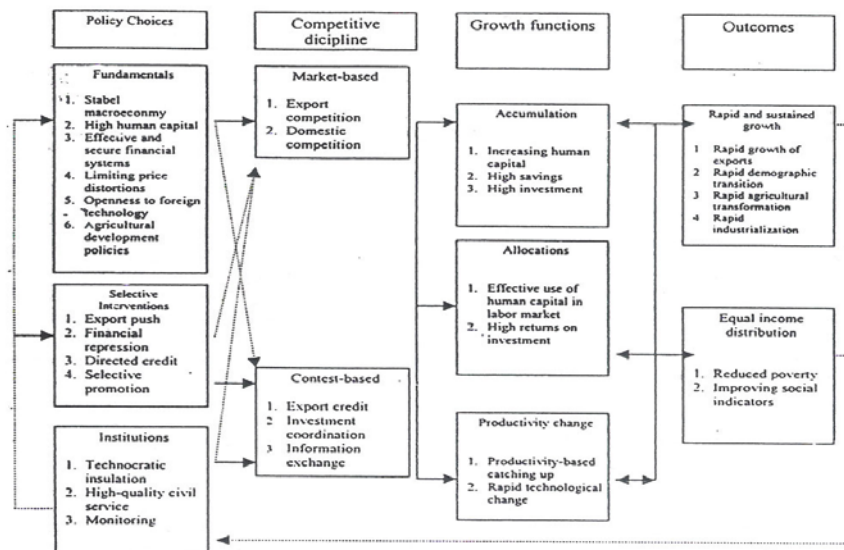
Kuznets juga mengemukakan enam karakteristik atau ciri proses pertumbuhan ekonomi yang bisa ditemui di hampir semua negara yang sekarang maju, antara lain:

- Tingkat pertumbuhan output perkapita dan pertumbuhan penduduk yang tinggi
- Tingkat kenaikan total produktivitas faktor yang tinggi
- Tingkat transformasi struktural ekonomi yang tinggi
- Tingkat transformasi sosial dan ideologi yang tinggi
- Adanya kecenderungan negara-negara yang mulai atau sudah maju perekonomiannya untuk berusaha merambah bagian-bagian dunia lainnya sebagai daerah pemasaran atau sumber bahan baku / penetrasi ekonomi internasional

- Terbatasnya penyebaran pertumbuhan ekonomi internasional yang hanya mencapai sepertiga bagian penduduk dunia

World Bank (Dalam Mursaiyadi, 2005:144) menjelaskan suatu pendekatan fungsional pada gambar 1.2 dalam memahami pertumbuhan ekonomi di negara-negara yang tergolong dalam *High Performance Asian Economies* / HPAEs termasuk Indonesia yang menunjukkan bagaimana pilihan-pilihan kebijakan memberikan kontribusi pada keberhasilan laju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pemerataan distribusi pendapatan lewat disiplin kompetisi yang selanjutnya berpengaruh terhadap pertumbuhan akumulasi, alokasi dan perubahan produktivitas.

Sedangkan garis putus-putus menunjukkan efek simultan antara empat elemen penting dalam pendekatan fungsional pertumbuhan ekonomi, SDM, stabilitas makroekonomi, sistem keuangan yang kokoh dan efektif, teknologi baru dan inovasi serta intervensi pemerintah terhadap perdagangan internasional merupakan komponen penting dalam peningkatan fungsi-fungsi pertumbuhan yang selanjutnya berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.



Sumber: *The East Asian Miracle*, World Bank, 1996: 88

**Gambar 2. Pola fungsional dalam pertumbuhan ekonomi menurut World Bank**

### Teori Ketidakseimbangan Pertumbuhan Wilayah

Teori ketidakseimbangan wilayah muncul sebagai reaksi terhadap konsep ketidakstabilan dan keseimbangan dari teori neo klasik. Teori ini mengutarakan bahwa

kekuatan pasar sendiri tidak dapat menghilangkan perbedaan-perbedaan antar wilayah dalam suatu negara bahkan sebaiknya kekuatan-kekuatan ini cenderung akan menciptakan dan bahkan memperburuk keadaan.

Dalam kritiknya terhadap teori keseimbangan pertumbuhan, Myrdal (Dalam Maya Panorama, 2004:20) berpendapat bahwa peubah-peubah dalam suatu sistem sosial tidak diikuti oleh penggantian perubahan-perubahan pada arah yang berlawanan. Dari pendapat ini Myrdal mengembangkan teori penyebab kumulatif dan berputarnya proses sosial untuk menjelaskan ketimpangan internasional dan antar wilayah. Menurut Myrdal (Dalam Maya Panorama, 2004:20) terdapat dua kekuatan yang bekerja dalam proses pertumbuhan ekonomi yaitu efek balik negatif (*Backwash Effect*) dan efek penyebaran (*Spread Effect*).

Kedua kekuatan ini menunjukkan konsekuensi spasial dari pertumbuhan ekonomi terpusat baik negatif maupun positif. Kekuatan efek penyebaran mencakup penyebaran pasar hasil produksi bagi wilayah yang belum berkembang, penyebaran inovasi dan teknologi, sedangkan efek balik negatif biasanya melampaui efek penyebaran dengan ketidakseimbangan aliran modal dan tenaga kerja dari wilayah pada sistem pasar bebas cenderung memperburuk kinerja ekonomi wilayah yang belum berkembang. Menurut Myrdal (dalam Maya Panorama, 2004:20), kondisi ini memberikan pengesahan terhadap intervensi mekanisme pasar untuk mengatasi efek balik negatif yang menimbulkan kesenjangan wilayah.

Teori ketidakseimbangan pertumbuhan wilayah lebih jauh dikembangkan oleh Kaldor. Menurut Kaldor (dalam Maya Panorama, 2004:21), pertumbuhan output wilayah ditentukan oleh adanya peningkatan skala pengembalian, terutama dalam kegiatan manufaktur. Hal ini berarti bahwa wilayah dengan kegiatan utama sektor industri pengolahan akan mendapat keuntungan produktivitas yang lebih besar dibanding wilayah yang bergantung pada sektor primer sehingga dapat disimpulkan bahwa wilayah dengan sektor industri akan tumbuh lebih cepat dibandingkan wilayah yang bergantung pada sektor primer.

### **Faktor-faktor Penyebab terjadinya Ketimpangan Ekonomi Regional**

Faktor-faktor utama penyebab ketimpangan ekonomi regional antar daerah di Indonesia adalah:

#### **1. Konsentrasi Kegiatan Ekonomi antar Daerah**

Di Indonesia pertumbuhan ekonomi nasional yang diterapkan selama pemerintah orde baru membuat secara langsung atau tidak langsung terpusatnya pembangunan ekonomi di Jawa, khususnya Jawa Barat dan Jawa Timur dan hingga tingkat tertentu di Sumatera. hal ini membuat terbelakangnya pembangunan ekonomi di propinsi-propinsi di luar Jawa, khususnya Indonesia bagian Timur (IBT). Selain itu memusatnya pembangunan di Jawa juga disebabkan oleh berbagai hal, diantaranya ketersediaan infrastruktur dan letak geografis, ekspansi ekonomi pada pola seperti ini terbukti mempunyai pengaruh yang mungkin bagi daerah-daerah lain karena tenaga kerja dan modal yang ada serta kegiatan perdagangan pindah dari daerah-daerah diluar Jawa ke Jawa.

Manurut Arsyad (Dalam Zazili Mustopa, 2005:32), kerugian dialami banyak daerah diluar Jawa, khususnya Indonesia bagian Timur, karena terpusatnya kegiatan ekonomi nasional di Jawa adalah salah satu contoh konkret dari pada yang dimaksud dengan *Backwash Effects* dari kegiatan ekonomi yang terpusat disuatu daerah.

## **2. Alokasi Investasi**

Indikator lain yang juga menunjukkan pola serupa seperti pola distribusi nilai tambah industri antar daerah adalah distribusi investasi langsung, baik yang bersumber dari luar negeri (PMA) maupun dalam negeri (PMDN). Berdasarkan teori pertumbuhan dari Harrod-Domar yang menerangkan adanya korelasi positif antara tingkat investasi dan laju pertumbuhan ekonomi, dapat dikatakan bahwa kurangnya investasi disuatu wilayah membuat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat perkapita diwilayah tersebut rendah karena tidak ada kegiatan-kegiatan ekonomi yang produktif.

Terpusatnya investasi di pulau Jawa atau terhambatnya perkembangan investasi daerah disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya kebijakan dari birokrasi yang terpusat sampai pada keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia di luar Jawa (Tambunan, 2003:178).

## **3. Tingkat Mobilitas Faktor Produksi yang Rendah antar Pulau**

Kurang lancarnya mobilitas faktor produksi, seperti tenaga kerja dan modal antar daerah juga merupakan penyebab terjadinya ketimpangan ekonomi regional. Menurut Tambunan (Dalam Zazili Mustopa, 2005:34), dasar terjadinya adalah perbedaan laju pertumbuhan ekonomi antar daerah membuat terjadinya perbedaan tingkat pendapatan perkapita antar daerah sejak perbedaan tersebut, dengan asumsi bahwa mekanisme pasar output dan input bebas (tanpa distorsi yang direkayasa, misal sebagai akibat dari suatu kebijakan pemerintah), mengetahui mobilitas atau (re) alokasi faktor produksi antar daerah. Sesuai teori Lewis yang dikenal dengan *unlimited supply of labor*, jika perpindahan faktor produksi antar daerah tidak ada hambatan, maka pada akhirnya pembangunan ekonomi yang optimal antar daerah akan tercapai dan semua daerah akan lebih baik.

## **4. Perbedaan SDA**

Dasar pemikiran “klasik” sering mengatakan bahwa pembangunan ekonomi di daerah yang kaya SDA-nya akan lebih maju masyarakatnya dan lebih makmur dibandingkan daerah yang miskin. Selain itu dibutuhkan faktor-faktor lain yaitu teknologi dan sumber daya manusia untuk mengolah sumber daya alam tersebut. Daerah-daerah di Indonesia yang kaya sumber daya alam seperti NAD, Riau, Kalimantan, dan Papua memang masih lebih baik dibanding daerah-daerah di luar Jawa yang miskin SDA, tapi tingkat pendapatan di daerah-daerah kaya tersebut tidak lebih tinggi dibanding daerah di Jawa yang relatif kaya SDM dan teknologi.

## **5. Perbedaan kondisi Demografis antar Daerah**

Perbedaan kondisi demografis antar daerah terutama dalam hal jumlah dan pertumbuhan penduduk, tingkat kepadatan penduduk, pendidikan, kesehatan, disiplin

masyarakat dan etos kerja. Faktor-faktor ini mempengaruhi tingkat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi lewat sisi permintaan dan penawaran. Dari sisi permintaan, jumlah penduduk yang besar merupakan potensi bagi pertumbuhan pasar, yang berarti faktor pendorong bagi pertumbuhan kegiatan-kegiatan ekonomi. Dari sisi penawaran, jumlah populasi yang besar dengan pendidikan, kesehatan yang baik, disiplin yang tinggi dan etos kerja yang tinggi merupakan aset penting bagi produksi.

## **6. Kurang Lancarnya Perdagangan antar Daerah**

Kurang lancarnya perdagangan antar daerah juga merupakan unsur yang turut menciptakan ketimpangan ekonomi regional di Indonesia. Ketidaklancaran tersebut disebabkan terutama oleh keterbatasan transportasi dan komunikasi, perdagangan antar propinsi meliputi barang jadi, barang modal, input perantara, barang baku, dan material-material lainnya untuk produksi dan jasa menjadi terganggu. Tidak lancarnya arus barang dan jasa antar mempengaruhi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah lewat sisi permintaan dan penawaran.

Menurut Tambunan (Dalam Zazili Mustopa, 2005:38), dari sisi permintaan, kelangkaan barang dan jasa untuk konsumen mempengaruhi permintaan pasar terhadap kegiatan ekonomi lokal yang sifatnya komplementer dengan barang tersebut. Dari sisi penawaran sulitnya mendapatkan barang dan modal seperti mesin dan alat-alat transportasi, input perantara dan bahan baku atau material lainnya, dapat menyebabkan kegiatan ekonomi disuatu propinsi lumpuh.

## **Indeks Theil**

Terdapat banyak literatur dalam pengukuran ketimpangan pendapatan. Salah satu yang sering digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan adalah Indeks Theil. Indeks Theil pertama kali dikembangkan oleh ahli Ekonometri Henri Theil (Dalam Mudrajat, 2001:87) untuk menganalisis ketimpangan antar region secara general. Pengembangan Indeks Theil dengan melakukan dekomposisi yang dapat dijumlahkan (*Additively Decomposable*) yaitu total ketimpangan pendapatan dapat ditulis sebagai penjumlahan antara ketimpangan antar grup-propinsi (*Between Group Inequality*) dan ketimpangan antar group itu sendiri (*Within Group Inequality*). Indeks Theil yang didekomposisikan ini memenuhi syarat pengukuran ketimpangan kesejahteraan yang efektif yaitu rata-rata yang bebas, prinsip replikasi populasi dan prinsip transfer dari piquou-dalton.

Kelebihan dari Indeks Theil sebagai perangkat untuk mengukur ketimpangan antara lain (Dalam Syamsurizal dan Imelda, 2005:3):

1. Indeks Theil memungkinkan untuk membuat perbandingan selama waktu tertentu, guna menganalisis kecenderungan konsentrasi geografis selama periode tertentu.
2. Menyediakan perbandingan secara rinci sub-unit geografis yang lebih kecil, guna mengkaji gambaran yang lebih rinci mengenai kesenjangan spasial.
3. Memungkinkan untuk menganalisis perubahan pola lokasi industri dan suburbanisasi.

Indeks Theil juga memiliki kekurangan sebagai perangkat untuk mengukur ketimpangan antara lain:

1. Dekomposisi Indeks Theil kedalam ketimpangan didalam region (*Within Group Inequality*) dan ketimpangan antar region (*Between Group Inequality*) tidak dapat melihat kontribusi faktor-faktor lain seperti pendidikan, ras, dan penduduk asli terhadap ketimpangan secara keseluruhan.
2. Dekomposisi Indeks Theil kedalam ketimpangan didalam region (*Within Group Inequality*) dan ketimpangan antar region (*Between Group Inequality*) tidak dapat memberikan kualifikasi yang jelas tentang penyebab ketimpangan yang di akibatkan oleh korelasi antara prinsip-prinsip dekomposisi. Pada awalnya disebutkan ketimpangan total dipengaruhi oleh ketimpangan antar grup (*Between Group Inequality*) dan selanjutnya dikatakan bahwa ketimpangan didalam region (*Within Group Inequality*) lah yang sangat mempengaruhi ketimpangan secara total.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini mencakup tiga puluh tiga (33) propinsi di Indonesia pada periode tahun 1993 sampai tahun 2005. Pada tahun 2005 terdapat satu propinsi baru yaitu Sulawesi Barat. Pada tahun 1999 propinsi Timor-Timur melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga total keseluruhan propinsi di Indonesia berjumlah 33 propinsi pada tahun 2005. Nilai produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dipakai adalah PDRB atas dasar harga konstan tahun 1993.

Pada penelitian ini, penulis ingin melihat tingkat pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan tingkat pendapatan antar propinsi di Indonesia dalam periode tahun 1993 sampai dengan tahun 2005. Penulis menggunakan Indeks *Theil* sebagai alat analisis. Pada penelitian ini, propinsi-propinsi dikelompokkan menjadi lima kelompok yaitu:

1. Pulau Sumatera yang terdiri dari propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung dan Kepulauan Riau.
2. Pulau Jawa dan Bali yang terdiri dari propinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten dan Bali.
3. Pulau Kalimantan yang terdiri dari propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.
4. Pulau Sulawesi yang terdiri dari propinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo dan Sulawesi Barat.
5. Indonesia bagian Timur yang terdiri dari propinsi Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Timor-Timur, Papua dan Irian Jaya Barat.

Laju pertumbuhan ekonomi bisa diukur dengan indikator PDRB untuk mengukur perekonomian daerah atau propinsi dan PDB untuk mengukur perekonomian nasional dari tahun ke tahun.

Formula pertumbuhan ekonomi dengan cara tahunan:

$$\Delta PDRB_n = \frac{PDRB_n - PDRB_{n-1}}{PDRB_{n-1}} \times 100\% \dots\dots\dots(1.1)$$

Dimana:

- $\Delta PDRB_n$  = Pertumbuhan PDRB propinsi tahun ke-n
- $PDRB_n$  = Nilai PDRB propinsi tahun ke-n
- $PDRB_{n-1}$  = Nilai PDRB propinsi tahun sebelumnya atau n-1

Semakin besar pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu daerah atau propinsi, mengindikasikan bahwa semakin baik perekonomian daerah atau propinsi tersebut secara keseluruhan.

Teknik analisis yang digunakan untuk melihat ketimpangan pendapatan antar propinsi di dalam penelitian ini adalah koefisien indeks Theil, koefisien ini sering digunakan untuk menganalisa distribusi spasial.

Formula Indeks Theil dengan pendekatan pendapatan:

$$T = \sum_{j=1}^N \left[ \frac{Y_j}{Y} \right] \ln \left[ \frac{Y_j}{Y} \right] \dots\dots\dots(1.2)$$

Dimana:

- T = Nilai indeks Theil
- Y = Jumlah Produk Domestik regional Bruto (PDRB) seluruh propinsi Indonesia
- $\frac{Y_j}{Y}$  = Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) propinsi j
- $\bar{Y}$  = Rata-rata PDB Seluruh propinsi Indonesia

Analisa terhadap hasil penghitungan indeks Theil yaitu semakin kecil nilai indeks Theil dari suatu negara atau region maka semakin merata tingkat pendapatan di negara atau region tersebut atau semakin mendekati angka 1 (satu) maka ketimpangan semakin besar. Penelitian ini juga menggunakan teknik analisis kualitatif untuk menjelaskan perkembangan PDRB dan ketimpangan antar grup-propinsi di Indonesia periode 1993-2005.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Pertumbuhan Ekonomi Antar Propinsi di Indonesia Periode 1993-2005

Salah satu tolak ukur untuk menilai dampak desentralisasi fiskal terhadap perekonomian daerah adalah dengan melihat tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang merupakan penjumlahan hasil-hasil kegiatan ekonomi di suatu daerah selama satu tahun. Secara umum rata-rata perkembangan PDRB grup-propinsi sebelum desentralisasi fiskal (1993-1999) yang tertinggi terdapat pada grup-propinsi Sulawesi dengan rata-rata pertumbuhan 7,1 persen pertahun, kemudian grup Indonesia Bagian Timur (IBT) dengan pertumbuhan rata-rata 5,95 persen, lalu grup Kalimantan dengan 5,7 persen, selanjutnya diikuti grup Sumatera dan Jawa-Bali dengan pertumbuhan PDRB sebesar 4,6 persen dan 3,3 persen pada periode 1993-1999.

**Tabel 3. Laju Pertumbuhan Ekonomi Grup-Propinsi di Indonesia Dengan Migas Atas Dasar Harga Konstan tahun 1993 periode 1993-2005 (Dalam %)**

| Tahun | Sumatera | Jawa-Bali | Kalimantan | Sulawesi | IBT   |
|-------|----------|-----------|------------|----------|-------|
| 1993  | -        | -         | -          | -        | -     |
| 1994  | 9.13     | 9.1       | 9.7        | 9.92     | 7.64  |
| 1995  | 6.93     | 6.91      | 6.75       | 5.55     | 12.32 |
| 1996  | 6.9      | 8.65      | 9.27       | 8.25     | 10.08 |
| 1997  | 3.99     | 4.42      | 5.37       | 6.88     | 5.77  |
| 1998  | -8.11    | -14.92    | -12.33     | 3.1      | 2.04  |
| 1999  | 1.7      | 6.01      | 15.13      | 8.8      | -4.26 |
| 2000  | 5.51     | 11.03     | 3.61       | 10.31    | 7.11  |
| 2001  | 3.56     | 3.91      | 4.02       | 4.97     | 2.25  |
| 2002  | 3.59     | 3.89      | 3.95       | 4.94     | 6.23  |
| 2003  | 4.54     | 4.41      | 3.12       | 5.29     | 3.53  |
| 2004  | 3.2      | 5.5       | 3.0        | 5.7      | 1.4   |
| 2005  | 3.3      | 5.7       | 3.8        | 6.15     | 6.5   |

Sumber: Statistik Indonesia 1993-2005, BPS SumSel, data diolah dari tabel 1.1

Sedangkan pada periode desentralisasi fiskal (2000-2005), rata-rata pertumbuhan PDRB grup-propinsi Kalimantan, Sulawesi, dan IBT justru menurun dibandingkan dengan periode sebelum desentralisasi fiskal. Pertumbuhan PDRB grup-propinsi tertinggi tetap terdapat pada grup Sulawesi dengan rata-rata pertumbuhan 6,3 persen, kemudian grup Jawa-Bali dengan pertumbuhan 5,9 persen, lalu grup IBT dengan 4,49 persen, selanjutnya diikuti grup Sumatera dan Kalimantan dengan rata-rata pertumbuhan PDRB sebesar 4,7 persen dan 4,2 persen pertahunnya.

Grup-propinsi Sumatera dan Jawa-Bali dalam periode desentralisasi fiskal (2000-2005) pertumbuhan ekonominya justru mengalami kenaikan hal ini dikarenakan pemerintah daerah masing-masing grup-propinsi tersebut telah mampu memanfaatkan peluang untuk membangun daerahnya yang disertai dengan pembangunan infrastruktur yang memadai, penyiapan sumber daya manusia yang profesional dan pembiayaan yang adil serta dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas sektor publik.

**Tabel 4. Laju Pertumbuhan Ekonomi Grup-Propinsi di Indonesia Tanpa Migas Atas Dasar Harga Konstan tahun 1993 periode 1993-2005 (Dalam %)**

| Tahun | Sumatera | Jawa-Bali | Kalimantan | Sulawesi | IBT   |
|-------|----------|-----------|------------|----------|-------|
| 1993  | -        | -         | -          | -        | -     |
| 1994  | 9.96     | 9.53      | 8.26       | 9.93     | 7.11  |
| 1995  | 9.27     | 7.15      | 10.58      | 5.5      | 13.05 |
| 1996  | 8.55     | 8.52      | 10.61      | 6.68     | 10.36 |
| 1997  | 6.16     | 2.51      | 6.28       | 8.47     | 5.83  |
| 1998  | -0.79    | -13.48    | -4.6       | 2.90     | 1.93  |
| 1999  | 2.13     | 5.32      | 3.53       | 8.93     | -0.39 |
| 2000  | 7.35     | 11.32     | 3.24       | 10.3     | 7.23  |
| 2001  | 3.69     | 4.11      | 4.66       | 4.97     | 2.33  |
| 2002  | 4.37     | 3.89      | 4.84       | 4.94     | 6.29  |
| 2003  | 4.92     | 4.52      | 4.12       | 5.77     | 3.37  |
| 2004  | 5.9      | 5.7       | 5.8        | 5.70     | 1.3   |
| 2005  | 6.5      | 7.9       | 6.2        | 6.95     | 6.38  |

Sumber: Statistik Indonesia 1993-2005, BPS SumSel, data diolah dari tabel 1

Secara nasional perekonomian Indonesia nampaknya masih terpusat di Jawa-Bali. Hal ini nampak pada rata-rata PDRB grup-propinsi Jawa-Bali yang nilainya hampir empat kali lipat dibandingkan dengan luar Jawa-Bali. Tingginya nilai PDRB Jawa-Bali disamping disebabkan oleh terpusatnya industri pengolahan, juga disebabkan pula besarnya alokasi dari pusat baik dalam bentuk Dana Inpres dan Alokasi Dana Sektorial pada masa sebelum diberlakukannya desentralisasi fiskal.

### **Indeks Ketimpangan Antar Grup-Propinsi di Indonesia**

Rata-rata indeks tanpa grup-propinsi Jawa-Bali untuk pendapatan dengan migas cenderung lebih tinggi dibandingkan pendapatan tanpa migas. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor migas masih memegang peranan penting dalam memberikan kontribusi terhadap PDRB grup-propinsi, khususnya Sumatera dan Kalimantan. Untuk grup-propinsi Sumatera, sektor migas menyumbang 20,77 persen dan 34,25 untuk grup-propinsi Kalimantan. Sedangkan untuk propinsi Sulawesi sektor migas hanya menyumbang 0,14 persen dan 2,4 persen untuk grup-propinsi IBT dalam periode 1993-2005. Hal inilah yang menyebabkan ketimpangan dengan migas tanpa grup-propinsi Jawa-Bali lebih besar dibandingkan tanpa migas.

**Tabel 5A. Nilai Indeks Theil Antar Grup-Propinsi Dengan Migas  
Periode 1993-2005**

| Tahun | Dengan Jawa-Bali | Tanpa Jawa-Bali |
|-------|------------------|-----------------|
| 1993  | 0.514993861      | 0.277582812     |
| 1994  | 0.514847444      | 0.277922850     |
| 1995  | 0.511956291      | 0.273738601     |
| 1996  | 0.511969932      | 0.267049954     |
| 1997  | 0.508330781      | 0.260832740     |
| 1998  | 0.465702109      | 0.240619871     |
| 1999  | 0.466180875      | 0.230957835     |
| 2000  | 0.482248169      | 0.225243087     |
| 2001  | 0.482898655      | 0.224857454     |
| 2002  | 0.480034980      | 0.221132193     |
| 2003  | 0.481350116      | 0.222293261     |
| 2004  | 0.489288617      | 0.221661681     |
| 2005  | 0.492511112      | 0.214748178     |

Rata-rata indeks ketimpangan dengan grup-propinsi Jawa-Bali untuk pendapatan tanpa migas cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan indeks ketimpangan dengan migas. Hal ini mengindikasikan bahwa grup-propinsi Jawa-Bali sektor terbesar penyumbang PDRB berasal dari sektor non migas. Sektor non migas rata-rata menyumbang 98,08 persen untuk PDRB grup-propinsi Jawa-Bali sedangkan sektor migas hanya menyumbang sebesar 1,9 persen dalam periode 1993-2005.

**Tabel 5B. Nilai Indeks Theil Antar Grup-Propinsi Tanpa Migas  
Periode 1993-2005**

| Tahun | Dengan Jawa-Bali | Tanpa Jawa-Bali |
|-------|------------------|-----------------|
| 1993  | 0.575572290      | 0.211902337     |
| 1994  | 0.578102458      | 0.216147301     |
| 1995  | 0.568676713      | 0.215304816     |
| 1996  | 0.566373936      | 0.213953370     |
| 1997  | 0.550361657      | 0.211782964     |
| 1998  | 0.501771281      | 0.185429838     |
| 1999  | 0.512374005      | 0.184128754     |
| 2000  | 0.529235367      | 0.184104419     |
| 2001  | 0.529874962      | 0.183574359     |
| 2002  | 0.525304444      | 0.180666690     |
| 2003  | 0.525167389      | 0.181996248     |
| 2004  | 0.528612447      | 0.187200702     |
| 2005  | 0.533942517      | 0.187094909     |

Tanpa grup-propinsi Jawa-Bali rata-rata indeks ketimpangan justru lebih kecil pada pendapatan tanpa migas. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor non migas, khususnya sektor pertanian, sektor industri pengolahan serta sektor pertambangan dan penggalian merupakan penyumbang terbesar bagi PDRB grup-propinsi lainnya. Sektor pertanian dalam periode 1993-2005 menyumbang 22,33 persen terhadap PDRB grup-propinsi Sumatera, 15,87 persen untuk grup-propinsi Kalimantan, 33,48 persen untuk grup-propinsi Sulawesi dan 24,92 persen untuk grup-propinsi IBT.

### **Indeks Ketimpangan di Dalam Grup-Propinsi di Indonesia Periode 1993-2005** **Indeks Ketimpangan di Dalam Grup-Propinsi Sumatera**

Setelah melalui perhitungan, didapat angka indeks ketimpangan di dalam grup-propinsi Sumatera mengalami kenaikan baik untuk pendapatan dengan migas maupun tanpa migas pada periode 1993-2005. Kenaikan ini mengindikasikan bahwa ketimpangan di dalam grup-propinsi Sumatera semakin besar.

**Tabel 6. Nilai Indeks Theil Grup-Propinsi Sumatera Periode 1993-2005**

| Tahun | Dengan Migas | Tanpa Migas |
|-------|--------------|-------------|
| 1993  | 0.233200410  | 0.227623951 |
| 1994  | 0.230731497  | 0.232807828 |
| 1995  | 0.228287034  | 0.233109924 |
| 1996  | 0.229326081  | 0.236942966 |
| 1997  | 0.231932518  | 0.242344159 |
| 1998  | 0.227863482  | 0.229211836 |
| 1999  | 0.230561583  | 0.231096806 |
| 2000  | 0.294068134  | 0.279815212 |
| 2001  | 0.293804468  | 0.280203035 |
| 2002  | 0.294530125  | 0.279269073 |
| 2003  | 0.294208881  | 0.278164364 |
| 2004  | 0.298229317  | 0.281366472 |
| 2005  | 0.302890376  | 0.310653859 |

Ketimpangan yang terjadi di dalam grup-propinsi Sumatera lebih disebabkan oleh:

1. Adanya beberapa propinsi yang memiliki sumber daya alam yang sangat besar, terutama migas yang dimiliki oleh propinsi NAD, Riau dan Sumatera Selatan. Sektor migas rata-rata memberikan kontribusi terhadap PDRB sebesar 35,52 persen untuk propinsi NAD, untuk propinsi Riau sebesar 57,73 persen dan 26,82 persen untuk propinsi sumatera dalam periode 1993-2005.
2. Sementara propinsi lain yang sangat miskin sumber daya alam seperti propinsi Bengkulu, Jambi dan Lampung hanya mengandalkan sektor pertanian dan sektor perdagangan, hotel dan restoran sebagai penyumbang terbesar PDRB. Meskipun propinsi-propinsi tersebut mengandalkan kedua sektor tersebut sebagai penopang PDRB, namun secara nominal sumbangan sektor pertanian dan sektor

perdagangan, hotel dan restoran Sumatera Utara masih lebih besar dibandingkan propinsi-propinsi tersebut.

- Adanya fenomena kota Medan di Sumatera Utara sebagai salah satu kota besar di Indonesia dan Sumatera Utara sebagai motor penggerak perekonomian untuk kawasan Sumatera. Propinsi Sumatera Utara tumbuh sebagai propinsi yang mengandalkan sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor industri pengolahan dan sektor pertanian. Sektor perdagangan, hotel dan restoran memberikan kontribusi sebesar 31,62 persen terhadap sektor perdagangan, hotel dan restoran Sumatera, sektor industri pengolahan memberikan kontribusi sebesar 28 persen terhadap sektor industri pengolahan Sumatera dan sektor pertanian memberikan kontribusi sebesar 27,02 persen terhadap sektor pertanian Sumatera tahun 2005.

### Indeks Ketimpangan di Dalam Grup-Propinsi Jawa-Bali

Setelah melalui perhitungan, didapat angka indeks ketimpangan di dalam grup-propinsi Jawa-Bali mengalami kenaikan baik untuk pendapatan dengan migas maupun tanpa migas pada periode 1993-2005. Kenaikan ini mengindikasikan bahwa ketimpangan di dalam grup-propinsi Jawa-Bali semakin besar.

**Tabel 7. Nilai Indeks Theil Grup-Propinsi Jawa-Bali Periode 1993-2005**

| Tahun | Dengan Migas | Tanpa Migas |
|-------|--------------|-------------|
| 1993  | 0.255046973  | 0.253609970 |
| 1994  | 0.256972419  | 0.256363711 |
| 1995  | 0.256464266  | 0.255807595 |
| 1996  | 0.258213123  | 0.255807595 |
| 1997  | 0.259033470  | 0.257752431 |
| 1998  | 0.244728137  | 0.244595105 |
| 1999  | 0.256255473  | 0.253138030 |
| 2000  | 0.272267964  | 0.267114456 |
| 2001  | 0.272284390  | 0.268457689 |
| 2002  | 0.272129049  | 0.268854738 |
| 2003  | 0.271961718  | 0.269340917 |
| 2004  | 0.272375369  | 0.270851248 |
| 2005  | 0.273376078  | 0.277164409 |

Ketimpangan yang terjadi di dalam grup-propinsi Jawa-Bali lebih disebabkan oleh:

- Adanya persebaran industri besar yang terpusat di propinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Banten sebagai salah satu kekuatan utama propinsi-propinsi tersebut. Sektor industri pengolahan memberikan kontribusi sebesar 17,33 persen untuk propinsi DKI Jakarta, 42,67 persen untuk propinsi Jawa Barat, untuk propinsi Jawa Tengah sebesar 32,23 persen, untuk propinsi Jawa Timur sebesar 27,55 dan 49,86 persen untuk propinsi Banten.

2. Sedangkan propinsi seperti DI Yogyakarta dan Bali hanya mengandalkan sektor pertanian dan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Kedua sektor tersebut memberikan kontribusi sebesar 52,62 persen untuk propinsi Bali dan 39,28 persen untuk DI Yogyakarta.
3. Walaupun tidak begitu besar sumbangnya terhadap PDRB propinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah, sektor migas turut memberikan kontribusi sebesar 3,74 persen untuk propinsi Jawa Barat dan 7,09 persen untuk propinsi Jawa Tengah pada tahun 2005. Bandingkan dengan propinsi DKI Jakarta sektor migas hanya memberikan kontribusi sebesar 0,31 persen dan untuk propinsi Jawa Timur sebesar 0,24 persen.

### **Indeks Ketimpangan di Dalam Grup-Propinsi Kalimantan**

Setelah melalui perhitungan, didapat angka indeks ketimpangan di dalam grup-propinsi Kalimantan mengalami penurunan untuk pendapatan dengan migas dan mengalami kenaikan untuk pendapatan tanpa migas pada periode 1993-2005. Kenaikan dan penurunan ini mengindikasikan bahwa ketimpangan di dalam grup-propinsi Kalimantan untuk pendapatan dengan migas semakin kecil dan untuk pendapatan tanpa migas semakin besar.

Ketimpangan yang terjadi di dalam grup-propinsi Kalimantan lebih disebabkan oleh:

1. Adanya keberadaan propinsi Kalimantan Timur yang memiliki sumber migas yang cukup besar. Pada tahun 2005 sektor migas menyumbang 55,25 persen untuk PDRB Kalimantan Timur. Bandingkan dengan Kalimantan Selatan yang sektor migasnya hanya menyumbang 2,59 persen.
2. Walaupun indeks tanpa migas Kalimantan menunjukkan ketimpangan yang sangat kecil sekali, tetapi Kalimantan Timur merupakan propinsi yang memiliki sektor pertambangan dan penggalian dan sektor industri pengolahan yang sangat kuat. Pada tahun 2005 sektor pertambangan dan penggalian Kalimantan Timur menyumbang 89,65 persen dari total keseluruhan PDRB sektor pertambangan dan penggalian Kalimantan. Sedangkan sektor industri pengolahan memberikan kontribusi sebesar 79,68 persen terhadap total PDRB sektor industri pengolahan Kalimantan.
3. Sedangkan propinsi-propinsi lainnya hanya mengandalkan sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran dan sektor pertambangan sebagai sumber utama PDRB walaupun nominalnya tidak sebesar propinsi Kalimantan Timur.

**Tabel 8. Nilai Indeks Theil Grup-Propinsi Kalimantan Periode 1993-2005**

| Tahun | Dengan Migas | Tanpa Migas |
|-------|--------------|-------------|
| 1993  | 0.215466042  | 0.057018519 |
| 1994  | 0.224238150  | 0.057395330 |
| 1995  | 0.211001753  | 0.045933513 |
| 1996  | 0.203010856  | 0.061305922 |
| 1997  | 0.198740751  | 0.061915407 |
| 1998  | 0.214916228  | 0.068069733 |
| 1999  | 0.221679009  | 0.071430013 |
| 2000  | 0.225178837  | 0.072462658 |
| 2001  | 0.232183142  | 0.079764108 |
| 2002  | 0.237411486  | 0.087218294 |
| 2003  | 0.231533660  | 0.086938300 |
| 2004  | 0.221598334  | 0.090474678 |
| 2005  | 0.212523818  | 0.092482312 |

### **Indeks Ketimpangan di Dalam Grup-Propinsi Sulawesi**

Setelah melalui perhitungan, didapat angka indeks ketimpangan di dalam grup-propinsi Sulawesi mengalami kenaikan baik untuk pendapatan dengan migas maupun untuk pendapatan tanpa migas pada periode 1993-2005. Kenaikan ini mengindikasikan bahwa ketimpangan di dalam grup-propinsi Sulawesi semakin besar.

Ketimpangan yang terjadi di dalam grup-propinsi Sulawesi lebih disebabkan oleh:

1. Hanya sektor pertanian yang masih terus diandalkan oleh propinsi-propinsi di grup-propinsi Sulawesi. Selama periode 1993-2005, rata-rata sektor pertanian menyumbang 33,48 persen terhadap PDRB Sulawesi. Bandingkan dengan sektor industri pengolahan yang hanya menyumbang 10,63 persen terhadap PDRB selama periode 1993-2005.
2. Sulawesi Selatan tumbuh sebagai satu-satunya propinsi yang dapat memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Pada tahun 2005 sektor industri pengolahan memberikan 64,92 persen terhadap PDRB sektor industri pengolahan Sulawesi dan sektor pertambangan dan penggalian memberikan kontribusi sebesar 52,29 persen terhadap PDRB sektor pertambangan dan penggalian Sulawesi.

**Tabel 9. Nilai Indeks Theil Grup-Propinsi Sulawesi Periode 1993-2005**

| Tahun | Dengan Migas | Tanpa Migas |
|-------|--------------|-------------|
| 1993  | 0.242990887  | 0.242990887 |
| 1994  | 0.223991094  | 0.223991094 |
| 1995  | 0.243763248  | 0.243763248 |
| 1996  | 0.245152827  | 0.245152827 |
| 1997  | 0.223400861  | 0.223400861 |
| 1998  | 0.264430183  | 0.262857983 |
| 1999  | 0.238251537  | 0.237275371 |
| 2000  | 0.323972079  | 0.322801249 |
| 2001  | 0.323032221  | 0.321845089 |
| 2002  | 0.319110257  | 0.317928948 |
| 2003  | 0.315330541  | 0.314204734 |
| 2004  | 0.307330733  | 0.309023799 |
| 2005  | 0.400042921  | 0.403131444 |

### **Indeks Ketimpangan di Dalam Grup-Propinsi Indonesia Bagian Timur**

Setelah melalui perhitungan, didapat angka indeks ketimpangan di dalam grup-propinsi IBT mengalami kenaikan baik untuk pendapatan dengan migas maupun untuk pendapatan tanpa migas pada periode 1993-2005. Penurunan ini mengindikasikan bahwa ketimpangan di dalam grup-propinsi IBT semakin besar. Ketimpangan yang terjadi di dalam grup-propinsi IBT lebih disebabkan oleh:

1. Papua, Nusa Tenggara Barat dan Irian Jaya Barat memiliki sumber daya alam yang berlimpah berupa pertambangan non migas yang tidak dimiliki oleh propinsi lainnya. Pada tahun 2005, sektor pertambangan dan penggalian ketiga propinsi tersebut menyumbang 98,65 persen terhadap PDRB sektor pertambangan dan Penggalian IBT dan sebesar 34,34 persen terhadap PDRB IBT tahun 2005.
2. Propinsi-propinsi IBT masih tetap mengandalkan sektor primer sebagai penyumbang PDRB selama periode 1993-2005. Sektor pertanian rata-rata menyumbang 24,92 persen terhadap PDRB IBT sedangkan sektor industri pengolahan hanya 4,37 persen.

**Tabel 10. Nilai Indeks Theil Grup-Propinsi Indonesia Bagian Timur  
Periode 1993-2005**

| Tahun | Dengan Migas | Tanpa Migas |
|-------|--------------|-------------|
| 1993  | 0.105719221  | 0.096584541 |
| 1994  | 0.105667216  | 0.094710739 |
| 1995  | 0.132695652  | 0.123820862 |
| 1996  | 0.146291552  | 0.138417968 |
| 1997  | 0.151182836  | 0.143434804 |
| 1998  | 0.243899197  | 0.234639365 |
| 1999  | 0.196573791  | 0.190924904 |
| 2000  | 0.274587290  | 0.268655085 |
| 2001  | 0.266157549  | 0.261076050 |
| 2002  | 0.278137658  | 0.273244338 |
| 2003  | 0.275481646  | 0.270529939 |
| 2004  | 0.255892789  | 0.250578470 |
| 2005  | 0.288033642  | 0.322056016 |

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Pertumbuhan ekonomi Grup-propinsi Jawa-Bali dan Sumatera pada era desentralisasi fiskal justru mengalami kenaikan. Hal sebaliknya justru terjadi di grup-propinsi Kalimantan, Sulawesi, dan IBT yang pertumbuhan ekonominya justru menurun pada era desentralisasi fiskal.

Ketimpangan antar grup-propinsi periode 1993-2005 mengalami tren penurunan baik untuk pendapatan dengan migas maupun tanpa migas. Ini berarti ketimpangan antar grup-propinsi semakin kecil.

Ketimpangan di dalam grup-propinsi walaupun terus berfluktuasi, namun dalam periode 1993-2005 menunjukkan tren meningkat. Hal ini dikarenakan adanya propinsi-propinsi yang kaya akan sumber daya alam terutama migas dan propinsi-propinsi yang memiliki sektor industri pengolahan, sektor pertambangan dan sektor perdagangan, hotel dan restoran yang kuat sebagai penyumbang utama PDRB selain sektor pertanian.

### **Saran-Saran**

1. Pemerintah harus membuat kebijakan yang tepat untuk mengurangi ketimpangan antar grup-propinsi dan didalam grup-propinsi serta pertumbuhan ekonomi yang merata baik secara kuantitas maupun secara kualitas diseluruh propinsi Indonesia.
2. Ketimpangan faktor-faktor yang dapat menyebabkan ketimpangan antar daerah harus lebih diperhatikan terutama alokasi investasi karena investasi merupakan awal dari pertumbuhan ekonomi.

## DAFTAR RUJUKAN

- Badan Pusat Statistik. 1993-2005. *Statistik Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Kuncoro, Mudrajat. *Analisis Spasial dan Regional (Studi Aglomerasi dan Kluster Industri Indonesia)*. Yogyakarta: AMPYKPN, 2001.
- Mursaiyadi. Pertumbuhan ekonomi VS Ekspor Sektoral Indonesia Paska Oil Boom: Uji Kausalitas dan Studi Komparatif dengan Thailand dan Malaysia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*. Vol 20, No. 2, h. 136-157, 2005.
- Mustopa, Zazili. *Analisis Ketimpangan Ekonomi Regional di Kabupaten Musi Banyuasin*, tesis tidak dipublikasikan. Palembang: Program Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya, 2005.
- Panorama, Maya. *Analisis Ketimpangan Pembangunan Antar Kabupaten / Kota di Sumatera Selatan*, tesis tidak dipublikasikan. Palembang: Program Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya, 2002.
- Sukirno, Sadono. *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan*. Bima Grafika, 1982.
- Sulistina, dan Kusumastuti, Rini. *Ketimpangan Pendapatan Antar Propinsi di Indonesil*, paper tidak dipublikasikan. Jakarta: Program Pasca Sarjana UI, 2005.
- Syamsurizal, dan Imelda. *Disparitas Regional*, makalah disajikan dalam mata kuliah Ekonomi Pembangunan Regional, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2006.
- Tadjoeddin, M. Zulfan, Suharyo, dan Mishra. *Aspirasi Terhadap Ketidakmerataan : Disparitas Regional dan Konflik Vertikal di Indonesia*, paper. Jakarta: *United Nations Support Facility for Indonesian Recovery (UNSFIR)*, 2001.
- Tambunan, Tulus. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Teguh, M. *Pembangunan Wilayah*, makalah disajikan dalam mata kuliah Perekonomian Indonesia, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2003.
- \_\_\_\_\_. *Pertumbuhan Ekonomi, Transformasi Produksi dan Beberapa Faktor Penyebab*, makalah disajikan dalam mata kuliah Perekonomian Indonesia, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2004.
- Todaro, Michael P. *Pembangunan Ekonomi di dunia ketiga*. Terjemahan. Edisi kedelapan. Jilid 1. Jakarta: Erlangga, 2000.
- Yasin, Makmun dan Akhmad. *Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja terhadap PDB Sektor Pertanian*. Kajian Ekonomi dan Keuangan. Vol.7. Jakarta : DEPKEU, 2003